

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Renstra SKPD merupakan dokumen yang memuat isi visi dan misi SKPD, tujuan, strategi dan arah kebijakan SKPD, program / kegiatan SKPD dalam 5 (lima) tahun ke depan beserta pendanaan indikatifnya serta indikator kinerjanya untuk mencapai sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra SKPD merupakan pedoman/acuan SKPD dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan anggaran.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah, perencanaan pembangunan lima tahunan yang menjadi kewenangan SKPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Kementerian/lembaga dan SKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Harapan dari tersusunnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan baik di pusat maupun di daerah berjalan secara efektif, efisien, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran serta dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian dari provinsi yang mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, maka Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 menjadi acuan ataupun pedoman SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan perencanaan tahunan yang disinkronkan dengan program/kegiatan Kementerian/Lembaga.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk sejak tahun 2000 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 dan menjadi daerah otonom dengan tujuan dapat lebih leluasa untuk merencanakan berbagai sektor pembangunan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada Wilayah Indonesia Bagian Barat, merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 2 (dua) pulau besar dan ribuan pulau kecil. Dua pulau terbesar adalah Pulau Bangka dan Pulau Belitung, selain itu terdapat pula pulau-pulau besar lainnya diantaranya Pulau Lepar, Pulau Pongok, Pulau Nangka, Pulau Panjang, Pulau Seliu, Pulau Mendanau, Pulau Gelasa, Pulau Selat Nasik, Pulau Nado dan Pulau Batu Dinding.

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relative datar yang terdiri dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 Meter diatas permukaan laut. Titik tertinggi di Pulau Bangka terdapat pada puncak gunung Maras dengan ketinggian 699 Meter dan di Pulau Belitung titik tertinggi pada puncak Gunung Tajam dengan ketinggian 445 Meter. Secara geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif aman dari bahaya beraspek geologi, karena terletak dibagian dalam sirkum pasifik dan sirkum mediterania di Indonesia yang merupakan jalur gunung berapi aktif dunia, namun jenis bahaya lain harus tetap diwaspadai terutama hidrometeorologi, dengan kejadian bencana banjir dan angin puting beliung yang mendominasi kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jenis bahaya lain yang tidak boleh diabaikan adalah bahaya biologi, teknologi dan kerusakan lingkungan yang mulai dirasakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dengan lobang – lobang bekas penambangan timah (inkonvensional yang mengabaikan konservasi dan reklamasi lahan) dibiarkan secara terbuka bukan suatu hal yang mustahil suatu saat nanti akan menimbulkan potensi bencana banjir, gerakan tanah (mass movement) dan penyebaran zat radioaktif yang terkandung dalam mineral ikutan dari limbah tailing timah.

Selain kondisi alam yang ada, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang termasuk daerah rawan bencana. Berbagai ancaman yaitu bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, angin puting beliung, kekeringan, gelombang pasang/abrasi pantai, dan tanah longsor. Kemudian bencana non alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, kebakaran bangunan/rumah, dan Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti penyakit/masalah kesehatan, epidemi, wabah penyakit.

Secara legal formal sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengertian/definisi bencana disebutkan: Bencana adalah Rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau factor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia , kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dengan demikian pengelolaan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat bencana” saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila kita terapkan ke dalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus kegiatan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana (kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa risiko, preventif, respon bencana, rehabilitasi dan rekontruksi) yang berkesinambungan/menerus yang melibatkan berbagai sektor terkait dan berbagai tingkat yang beragam sejak dari tingkat desa hingga tingkat Internasional.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Permendagri 46 tahun 2008 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta melihat kondisi alam yang ada, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggap perlu untuk dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

a. Landasan Idiil

Landasan Idiil yang digunakan yaitu Pancasila.

b. Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional yaitu UUD RI 1945, khususnya :

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

c. Landasan Operasional yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur Di

- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - e. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 - h. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - i. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 - j. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
 - k. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - l. Permendagri Nomor 27 Tahun 2007 Pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
 - m. Permendagri 46 tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 - n. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 - o. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

- p. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
- q. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk menjabarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai dokumen perencanaan bagi penyelenggaraan bidang Penanggulangan Bencana khususnya yang menjadi tugas dan fungsi pokok BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan maksud agar penyelenggaraan pembangunan bidang Penanggulangan Bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rentang waktu selama 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2012 sampai dengan 2017 dapat menjadi pedoman dalam rangka kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan juga evaluasi terhadap indikator capaian yang ditetapkan, selain itu dalam upaya mendukung dengan terwujudnya penyelenggaraan tatakelola organisasi yang berkualitas guna mendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang transparan dan akuntabel.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD sesuai dalam tugas pokok dan fungsi;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun;

3. Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, tepat dan terpadu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

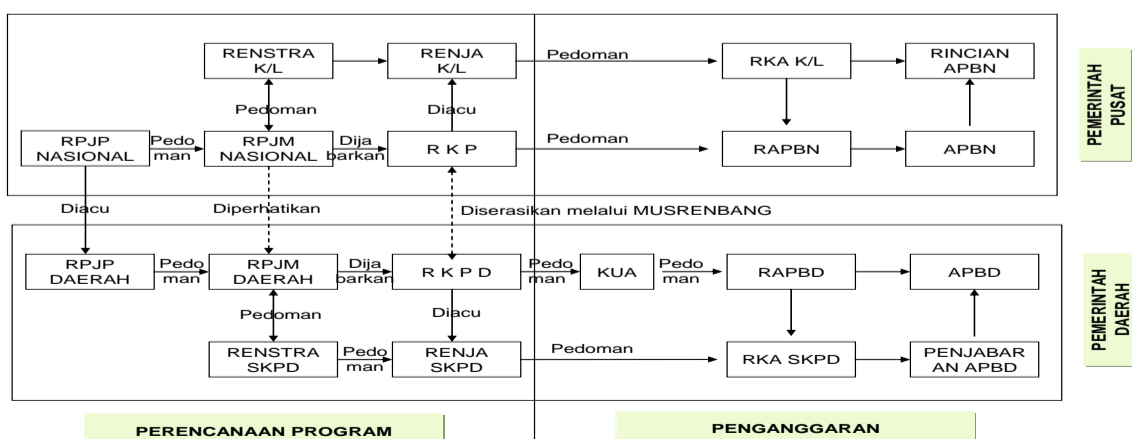
1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Strategis (Renstra BPBD) merupakan dokumen perencanaan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di daerah, sinkronisasi dan sinergisitas program serta kegiatan Renstra SKPD BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu kepada Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI. Dengan demikian, renstra SKPD BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kaitan substantif dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus renstra BNPB RI.

Proses penyusunan Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah (Renstra SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 adalah sebagai ditampilkan dalam bagan berikut berikut :

Dalam bagan / tabel di bawah ini digambarkan hubungan dokumen Renstra SKPD dengan dokumen lainnya

Gambar 1.1
Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan dokumen lainnya.



Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Teknokratik yaitu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
2. Partisipatif yaitu pendekatan perencanaan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Politik yaitu agenda-agenda pembangunan berdasarkan kebijakan kepala daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD.
4. Atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui Forum SKPD .
5. Kompetitif yaitu dilaksanakan dengan metode seleksi proposal usulan program dan kegiatan dengan kriteria tertentu dan melalui beberapa tahapan seleksi.
6. Sosio-kultural yaitu perencanaan melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra SKPD, proses penyusunan Renstra SKPD, kedudukan Renstra SKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen Renstra SKPD dengan dokumen lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra SKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD bagi SKPD yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen Renstra SKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.4. Hubungan antar Dokumen

Memberikan penjelasan tentang hubungan Renstra SKPD dengan dokumen lain yang relevan.

1.5. Sistematika Dokumen Renstra SKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Renstra SKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya BPBD

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

3.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA

3.4 TELAAH RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI BPBD

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BPBD

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BPBD

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD**

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD

Tugas :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang Penanggulangan Bencana..

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2009 Bab II pasal 5 BPBD Provinsi mempunyai tugas;

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, BPBD Provinsi mempunyai fungsi;

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan;
- d. Pengkoordinasian, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- f. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan lingkup BPBD;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya BPBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah, disebutkan bahwa susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

A. Kepala Pelaksana

B. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- C. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
1. Seksi Pencegahan
 2. Seksi Kesiapsiagaan
- D. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
1. Seksi Kedaruratan
 2. Seksi Logistik
- E. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
1. Seksi Rehabilitasi
 2. Seksi Rekonstruksi

Susunan Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2010, struktur kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

- a. 1 (satu) jabatan Kepala Pelaksana Badan yang setara dengan jabatan eselon II.a;
- b. 1 (satu) jabatan Sekretaris Badan yang setara dengan jabatan eselon III.a;
- c. 3 (tiga) jabatan Kepala Bidang yang setara dengan jabatan eselon III.a;
- d. 3 (tiga) jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di Sekretariat yang setara dengan jabatan eselon IV.a;
- e. 6 (enam) jabatan Kepala Seksi yang berada di Bidang yang setara dengan jabatan eselon IV.a;

Pegawai yang ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kep.Bangka Belitung berdasarkan daftar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Urutan Kepangkatan
Tahun 2012

No.	Pegawai berdasarkan golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	1
2.	Pembina Tk. I, IV/b	1
3.	Pembina, IV/a	2
4.	Penata Tk I, III/d	6
5.	Penata, III/c	5
6.	Penata Muda Tk. I, III/b	2
7.	Penata Muda, III/a	11
8.	Pengatur Tk. I, II/d	-
9.	Pengatur, II/c	8
10.	Pengatur Muda Tk. I, II/b	2
11.	Pengatur, II/a	2
	Jumlah	40

Pegawai yang ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Tahun 2012

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana / S3	0	0	0
2	Pasca Sarjana / S2	4	0	4
3	Sarjana / S1	11	7	18
4	Diploma-IV	1	0	1

5	Diploma-III	4	1	5
6	Diploma-I/ II	0	0	0
7	SLTA	9	3	12
8	SLTP	0	0	0
9	SD	0	0	0
	Jumlah	29	11	40

**Data sampai dengan 31 Desember 2012*

Tabel 2.3
Peta Jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Eselonering

No	Eselonering	Jabatan		Jumlah
		Terisi	Kosong	
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	4	0	4
3	Eselon IV	8	1	9
8	Fungsional	0	0	0
	Jumlah	13	1	14

**Data sampai dengan 31 Desember 2012*

2.3 KINERJA PELAYANAN BPBD

Dalam rangka mewujudkan Penanggulangan Bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada dasarnya kegiatan BPBD adalah sebagai **“Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Secara Cepat, Tepat dan Terpadu berdasarkan keikhlasan dan kejujuran menuju masyarakat Bangka Belitung yang damai dan mandiri”**. Setiap program penanggulangan bencana dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Pada dua tahun terakhir setelah terbentuknya BPBD, umumnya kualitas penyelenggaraan Penanggulangan Bencana daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus menerus mengalami perbaikan di seluruh sisi. Beberapa indikator dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah terkait dengan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut adalah :

- a. indikator dalam mendukung RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.
- b. indikator dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPBD

Sampai saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh Kepala Badan dan dijalankan oleh Kepala Pelaksana Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan
2. Unsur Pelaksana yaitu Kepala Pelaksana Badan
3. Unsur Pembantu Pelaksana yaitu
 - A. Sekretariat yang terdiri dari :
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - c. Subbag Keuangan;
 - d. Subbag Program dan Pelaporan.
 - B. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a. Kasi Pencegahan
 - b. Kasi Kesiapsiagaan

C. Bidang Kedaruratan dan Logistik

- a. Kasi Kedaruratan
- b. Kasi Logistik

D. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a. Kasi Rehabilitasi
- b. Kasi Rekonstruksi

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai landasan Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- a. Melakukan pengkoordinasian perencanaan, pembinaan dan pengendalian program dan tata usaha, dan perumusan kebijakan teknis perencanaan penanggulangan bencana baik pra bencana, saat terjadinya bencana dan pasca bencana.
- b. Melaksanakan dan menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana yang telah ditetapkan.

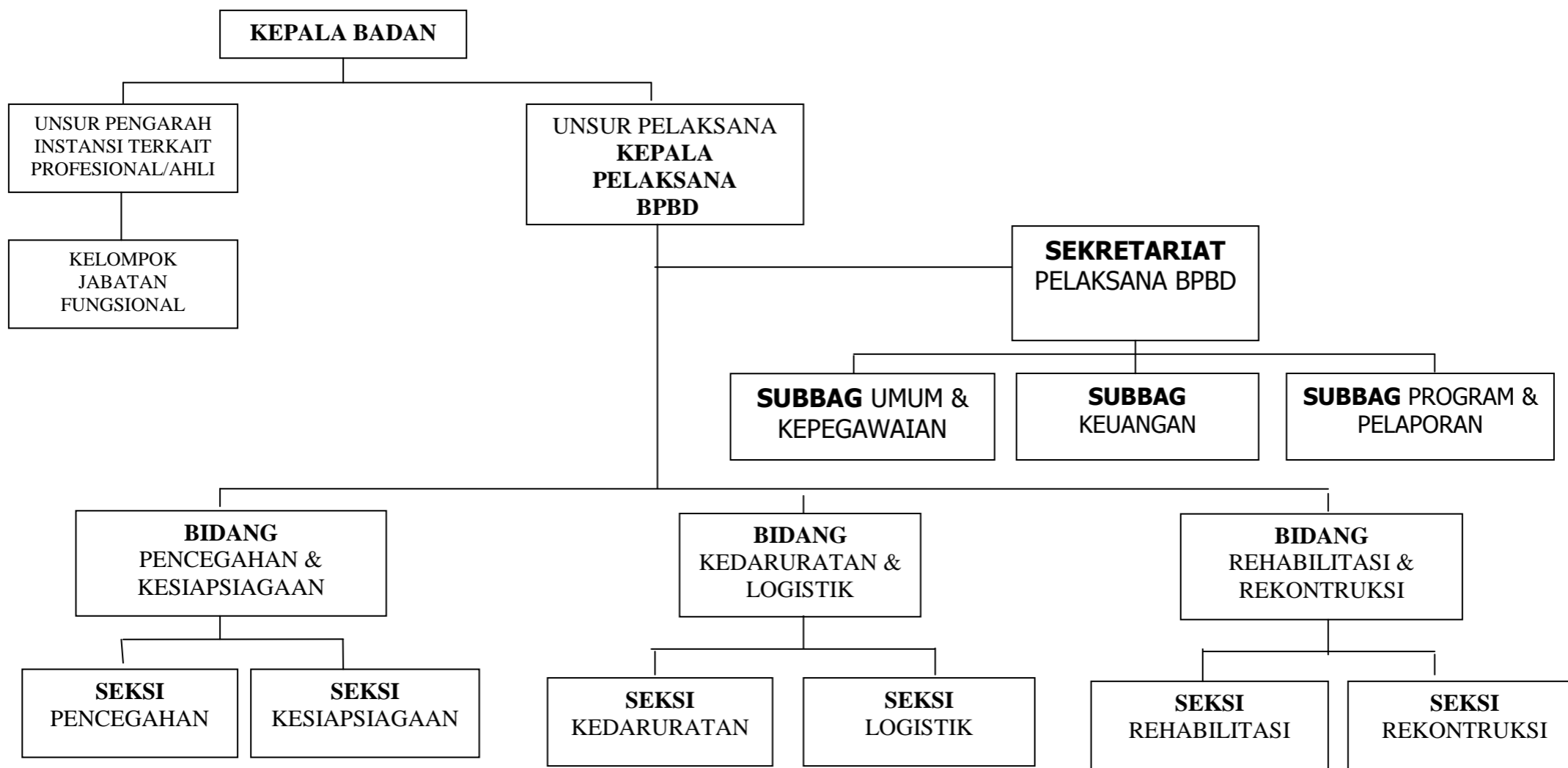
Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 - 2017 adalah sebagai berikut:

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;

- c. Peningkatan kemampuan aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui dan memahami masalah penanggulangan bencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepastian hukumnya dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Membangun bersama masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, tepat dan terpadu;
 - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3. Strategi melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penanganan bencana yang lebih bermutu bernuansa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan;
 - b. Menyiapkan sarana, prasarana dan tanggap darurat secara cepat dan tepat saat terjadinya bencana;
 - c. Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan secara terpadu pasca bencana.

Bagan 2.1

**STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



BAB III

ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Bagian ini menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1. Kendala

Permasalahan secara umum yang dihadapi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain :

- a. Penjabaran dari Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana belum semuanya teregulasi
- b. Belum adanya standart operational procedure (SOP) dalam Penanggulangan Bencana;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam lintas sektoral Penanggulangan Bencana baik ditingkat Kabupaten dan Kota;
- d. Belum terpenuhinya peralatan dan sarana penanggulangan bencana yang ideal;
- e. Rencana Operasi tidak sesuai dengan keadaan nyata di lapangan;
- f. Masih kurangnya Keterbatasan sumber daya manusia seperti halnya pegawai yang kurang dari segi kualitas maupun kuantitas dalam hal kondisi paradok yang di hadapi yang merujuk pada Tugas dan Fungsi yang di sandang sebagai pengelola masalah kebencanaan serta tugas dan fungsi lainnya belum dapat diandalkan
- g. Masih kurangnya pemahaman aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- h. Minimnya dukungan anggaran untuk urusan wajib Penanggulangan Bencana. (APBD).

- i. Belum terbentuknya BPBD di seluruh Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga tidak optimalnya koordinasi apabila terjadi bencana di daerah tersebut.

2. Peluang

- a. Adanya Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor : 21,22, dan 23 Tahun 2008;
- b. Adanya kebijakan tentang penanggulngn bencana;
- c. Harapan masyarakat tentang penanggulangan bencana semakin meningkat;
- d. Adanya dukungan dana APBD dan APBN;
- e. Dukungan Gubernur terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f. Dukungan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- g. Kerjasama dengan organisasi-organisasi penanggulangan bencana,perguruan tinggi, Departemen, LSM, Dinas/Instansi lain dan swasta.

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Rpjmd Tahun 2012-2017

Bagian ini mengemukakan saja tugas dan fungsi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut

VISI :

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun Visi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:
“Terwujudnya “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Secara

Cepat, Tepat dan Terpadu berdasarkan keikhlasan dan kejujuran Menuju Masyarakat Bangka Belitung yang damai dan mandiri”

MISI :

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirumuskan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Mempersiapkan masyarakat dalam pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana;
2. Menggerakkan masyarakat dalam upaya penanganan Bencana yang lebih bermutu bernuansa pencegahan, mitigasi & kesiapsiagaan dari pada tanggap darurat dan rehabilitasi;
3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan bencana yang bermutu, merata dan terjangkau secara professional;
4. Meningkatkan keterpaduan penyelenggaran penanganan bencana;
5. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam penanganan bencana;
6. Menyediakan informasi secara cepat, tepat dan akurat untuk penanganan bencana dan masalah-masalah lain.
- 7, Mewujudkan ketaatan pemerintahan yang baik dalam rangka mencapai pemerintan yang bersih.

3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra

Telaahan Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak tercantum dalam urusan wajib dan pilihan, tetapi dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas bidang penanggulangan bencana baik pra bencana, saat terjadinya bencana dan pasca bencana.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dengan Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga tidak terlepas dari RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena renstra disusun dengan memperhatikan RPJMD, sedangkan dalam penyusunan RPJMD maka RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu dokumen yang harus diacu dalam penyusunannya disamping dokumen lainnya. Didalam Rancangan Akhir RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satu substansinya adalah rencana struktur ruang. Struktur ruang wilayah merupakan kerangka dasar sistem prasarana dan sarana wilayah di dalam pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah dapat berupa pemanfaatan potensi, juga dalam kerangka mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Wilayah rawan bencana

Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Ancaman bencana alam tersebut antara lain adalah banjir dan cuaca ekstrim (puting beliung). Di samping itu bencana non alam seperti gagal teknologi (kecelakaan transportasi) juga tetap menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat. Terdapat 3 (tiga) potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya. Potensi bencana tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 3.1. Data Bencana Alam
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

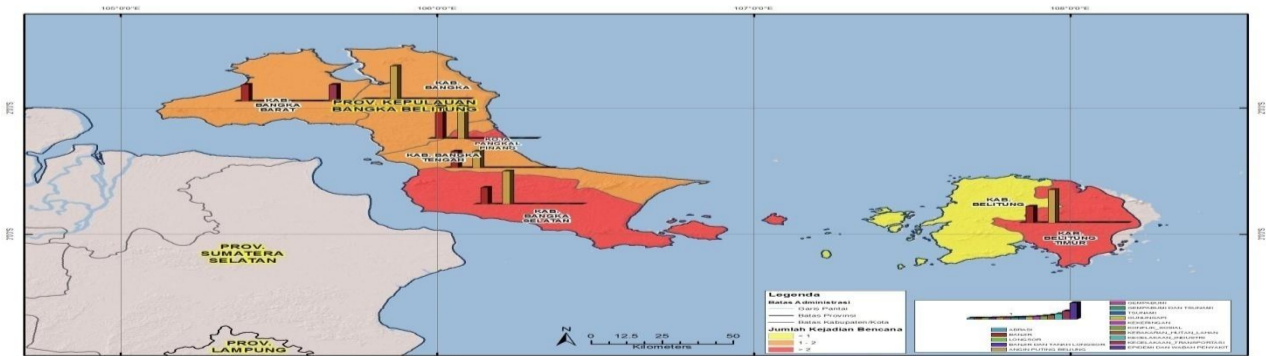
Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Korban	Menderita	Dipindah	Mengungsi	Rusak Berat	Rusak Ringan	Rusak Ringan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Banjir	6	0	0	0	0	1,248	0	44	0	0	0
Gagal Teknologi	0	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuaca Ekstrim	9	0	0	0	0	561	0	0	67	0	579
Total	16	0	1	8	0	1,809	0	44	67	0	579

Sumber : Data dan Informasi Bencana Indonesia 2011

Berdasarkan tabel di atas, kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bencana banjir telah terjadi sebanyak 6 (enam) kejadian yang umumnya terjadi pada tahun 2007 dan 2008. Bencana banjir terbesar terjadi pada tahun 2007 di Kabupaten Bangka Selatan yang menyebabkan 14 rumah rusak berat dan 76 penduduk mengungsi. Kejadian lainnya di tahun yang sama yaitu di Kabupaten Pangkal Pinang yang menyebabkan 300 penduduk mengungsi.
2. Untuk bencana cuaca ekstrim (puting beliung), tercatat sebanyak 9 (sembilan) kejadian. Kejadian terburuk terjadi pada 2007 di Kabupaten Belitung dimana 35 rusak menderita rusak berat dan 73 rumah rusak ringan. Dan pada tahun 2008 di Kota Pangkal Pinang dimana puting beliung telah menyebabkan 472 rumah rusak ringan.

Untuk melihat jumlah kejadian bencana di Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.



Gambar 1. Peta kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah kejadian di Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur memiliki tingkat kejadian lebih dari 2 kali untuk bencana Banjir dan cuaca ekstrim . Sedangkan Kabupaten Belitung tidak ada kejadian bencana di wilayah tersebut.

Atas dasar potensi dan permasalahan/kendala serta tujuan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka pengembangan struktur ruang wilayah diarahkan untuk:

- Memperkuat kualitas prasarana dan sarana wilayah, khususnya sistem penanggulangan bencana.
- Memperkuat kualitas prasarana dan sarana kawasan-kawasan potensial.
- Memperkuat prasarana dan sarana yang berorientasi lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Penanggulangan Bencana karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang Penanggulangan Bencana secara umum, maka isu strategis yang berkembang pada saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas umum BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

1. Belum semua regulasi penjabaran dari Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana telah ditetapkan.

2. Belum adanya standart operational procedure (SOP) dalam penanggulangan bencana.
3. Belum optimalnya koordinasi dalam penanggulangan bencana.
4. Belum terpenuhinya peralatan dan sarana penanggulangan bencana.
5. Belum optimalnya sumberdaya manusia dalam penanganan tindak darurat bencana.
6. Masih kurangnya kesadaran dan ilmu pengetahuan masyarakat akan pentingnya dalam penanggulangan baik Pra bencana, Saat bencana, dan pasca bencana.
7. Masih kurangnya pemahaman aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
8. Masih kurangnya tenaga relawan penanggulangan bencana di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Proses monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan walau dengan kualitas pelaksanaan yang belum memadai.
10. Proses pembangunan kesiapsiagaan di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dilaksanakan secara terpadu dan terstruktur,
11. Belum terbentuknya BPBD di seluruh Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

4.1 VISI dan MISI

VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun Visi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kep.Bangka Belitung yaitu:

“Terwujudnya “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Secara Cepat, Tepat dan Terpadu Berdasarkan Keikhlasan Dan Kejujuran Menuju Masyarakat Bangka Belitung Yang Damai Dan Mandiri”

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirumuskan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

- 1. Mempersiapkan masyarakat dalam pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana;**
- 2. Pencegahan/mitigasi & kesiapsiagaan, tanggap darurat & logistik Menggerakkan masyarakat dalam upaya penanganan Bencana yang lebih bermutu bernuansa serta rehabilitasi & rekonstruksi penanggulangan bencana.**
- 3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan bencana yang bermutu, merata dan terjangkau secara professional;**
- 4. Meningkatkan keterpaduan penyelengaran penanganan bencana;**
- 5. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam penanganan bencana;**

- 6. Menyediakan informasi secara cepat, tepat dan akurat untuk penanganan bencana dan masalah-masalah lain.**
- 7. Mewujudkan ketaatan pemerintahan yang baik dalam rangka mencapai pemerintan yang bersih.**

4.2 Tujuan & Sasaran

TUJUAN

1. Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang memadai;
2. Mengembangkan Sumber Daya Aparatur dan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana;
3. Mendukung kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana;
4. Mengembangkan budaya sadar bencana dalam masyarakat;
5. Mendorong semangat gotong royong dan kedermwanaan.

SASARAN

Sasaran adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Berbagai sasaran dan target kinerja yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif dan efisien dengan didukung oleh logistik yang memadai;
3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

4.3 STRATEGI dan KEBIJAKAN

STRATEGI

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan akan dapat dicapai oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Profesionalisme petugas BPBD Provinsi dan Kab/Kota dalam upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
2. Mendorong terbentuknya unit kerja untuk penanganan masalah bencana di daerah seperti; Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (STPB) dibawah BPBD provinsi dan Kab/Kota;
3. Mengembangkan sistem informasi, komunikasi dan manajemen Penanggulangan Bencana (PB) secara berjenjang hingga ke tingkat Desa;
4. Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan STPB di Provinsi dan Kab/Kota;
5. Meningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi dgn instansi/satuan kerja yg terkait dalam Penanggulangan Bencana;
6. Memperkuat jejaring informasi dan komunikasi melalui peningkatan intensitas pertemuan koordinasi dan kemitraan lintas program/lintas sektor, organisasi non pemerintah, masyarakat dan mitra kerja internasional secara berkala;
7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan pemerintah dlm Penanggulangan Bencana pada pra bencana, dan bagi korban, saat bencana (tanggap darurat) dan pasca bencana;
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas PB dari unsur pemerintah dan masyarakat (sukarelawan) melalui pendidikan dan pelatihan;
9. Meningkatkan pemberdayaan & kemandirian masyarakat dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi krisis serta penanganan masalah bencana di wilayahnya.

KEBIJAKAN

1. Penanganan Penanggulangan Bencana lebih menitik beratkan pada upaya sebelum terjadinya bencana, saat bencana dan pasca bencana;

2. Pengorganisasian Penanggulangan Bencana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilaksanakan dgn semangat desentralisasi dan otonomi;
3. Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
4. Penanggulangan Bencana diselenggarakan dengan memperkuat koordinasi dan kemitraan baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
5. Pemantapan jejaring lintas program dan lintas sektor dlm Penanggulangan Bencana pada tingkat pusat, Provinsi dan kabupaten/kota;
6. Pemantapan sistim Informasi dan komunikasi Penanggulangan Bencana;
7. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPBD provinsi dan Kab/Kota serta masyarakat guna menunjang kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan Bencana;
8. Setiap korban akibat bencana mendapatkan pelayanan paripurna secara optimal dan manusiawi dan responsif gender.
9. Pada masa tanggap darurat, pelayanan korban bencana dijamin oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Ditetapkannya strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan, maka BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Prioritas yang menjadi urusan wajib pada tahun 2012-2017 adalah penyusunan dokumen perencanaan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta kegiatan pendukung pelaksanaan perencanaan daerah lainnya.

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah.

5.1. PROGRAM STRATEGIS

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan melalui strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, maka program-program perencanaan penanggulangan bencana daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini merupakan program dalam mendukung aktivitas perkantoran BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya sarana dan prasarana aparatur di lingkungan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini secara umum juga bertujuan untuk peningkatan disiplin aparatur pemerintah khususnya pada BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya.

Tujuan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya adalah untuk Mendukung Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Dalam pembangunan Penanggulangan Bencana.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini secara umum juga bertujuan untuk peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur khususnya pada BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini adalah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan yang di jabarkan dalam bentuk penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ pada BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Program ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan sistem pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

8. Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tim penanganan darurat yang cepat, tepat dan akurat dengan didukung logistik/peralatan yang memadai pada saat terjadinya bencana di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

9. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Program ini dilaksanakan agar terciptanya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang meliputi seluruh aspek kehidupan.

5.2. KEGIATAN STRATEGIS

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk melaksanakan program di atas, maka disusun kegiatan pada BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 sebagai berikut:

I. Program Rutin :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
6. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

II. Program Wajib

7. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Kegiatan BPBD yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :

- a. Koordinasi dan sosialisasi Kelembagaan dan Mitigasi Bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait.
- c. Sosialisasi Tentang Penanggulangan Bencana ke Pelajar/Mahasiswa.
- d. Menyediakan bantuan pengadaan buku pegangan dan bahan ajar untuk pendidikan siaga bencana.
- e. Fasilitasi pembentukan forum PRB dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penanggulangan bencana daerah
- f. Penyediaan dukungan partisipasi lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- g. Perencanaan dan pembangunan jaringan informasi dan komunikasi kebencanaan terpusat dengan pemanfaatan fasilitas umum sebagai interface
 - h. Identifikasi daerah rawan bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana.
 - i. Sosialisasi tentang kesiapsiagaan Banjir
 - j. Menyusun dokumen kajian risiko bencana daerah/data base potensi bencana
 - k. Melakukan latihan berkala kesiapsiagaan Bencana banjir
 - l. Pelatihan kesiapsiagaan bencana cuaca ekstrim
 - m. Pelatihan kesiapsiagaan bencana dikawasan perindustrian
 - n. Pendidikan dan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana
 - o. Pembangunan Tanggul Penahan Abrasi
 - p. Pembangunan Break Water di Pesisir Pantai
 - q. Pembangunan Jalur Evakuasi
 - r. Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Diri Saat Terjadi Bencana.
 - s. Penyusunan Rencana Evakuasi di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana
 - t. Pembangunan Jaringan Informasi Kebencanaan Terpusat
 - u. Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana
 - v. Budidaya tanaman Mangrove dan Terumbu Karang di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi
 - w. Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana
 - x. Simulasi Evakuasi Masyarakat terhadap Bencana Banjir
 - y. Simulasi Penanganan Darurat Bencana Kebakaran dan Kegagalan Teknologi berbasis Masyarakat
 - z. Gladi Posko Berkala Prosedur Operasi standar Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana
 - aa. Penyusunan Rencana Kontijensi
8. Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana.

Kegiatan BPBD yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :

- a. Pembelajaran Penanggulangan Bencana ke Daerah Rawan Bencana
- b. Seleksi Tim Satuan Reaksi Cepat
- c. Operasional Kegiatan Kejadian Penanggulangan Bencana
- d. Pelatihan Penguatan SRC BPBD
- e. Pengadaan makanan tambahan bagi Tim PB-BPBD
- f. Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat
- g. Pengadaan Bahan Baku Bangunan Tanggap Darurat Bencana
- h. Penyiapan/Pengadaan Logistik di Kawasan Rawan Bencana
- i. Penyiapan /pengadaan peralatan dikawasan rawan bencana
- j. Pemeliharaan/Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
- k. Pengambilan serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana. berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- l. Pengerahan dan mobilisasi TRC dalam tanggap darurat Bencana dan pencarian , pertolongan, evakuasi di lokasi benca.

9. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Kegiatan BPBD yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :

- a. Pengembangan jembatan portebel (jembatan Balley)
- b. Pengembangan Huntara menjadi Huntap dari panel beton
- c. Pelatihan Erection / install Jembatan Bailey
- d. Pelatihan Erection / install Huntara menjadi Huntap dari beton panel
- e. Pelatihan perhitungan (DaLA) pascabencana.
- f. Pengujian huntara tahan gempa.
- g. Uji Terap pengembangan rehabilitasi penanaman mangrove / bakau di kawasan pesisir akibat abrasi di Kab. Bangka Tengah

- h. Uji Terap pengembangan rehabilitasi penanaman mangrove / bakau di kawasan pesisir akibat abrasi di Kab. Bangka
- i. Uji Terap pengembangan rehabilitasi penanaman mangrove / bakau di kawasan pesisir akibat abrasi di Kab. Belitung
- j. Uji Terap pengembangan rehabilitasi penanaman mangrove / bakau di kawasan pesisir akibat abrasi di Kab. Bangka Selatan
- k. Pelatihan Pendampingan / Konseling dampak psikis pasca bencana
- l. Pemulihan kesehatan psikis masyarakat pasca bencana di 7 Kab/Kota
- m. Koordinasi dan sosialisasi kegiatan rehabilitasi dan sosialisasi di 7 Kab/Kota
- n. Pembelajaran dan studi lapangan penerapan teknologi rehabilitasi dan rekonstruksi ke instansi teknis
- o. Pemberian bantuan dana tunjangan hidup sementara, kesehatan dan perbaikan rumah masyarakat pasca bencana di 7 Kab/Kota

5.3. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan dari setiap program/kegiatan. Sedangkan untuk kelompok sasaran utama adalah aparatur dan program/kegiatan Penanggulangan Bencana daerah.

Untuk menjelaskan indikator program dan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Indikator Kinerja adalah Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran
 - Sasaran adalah Lingkungan internal dan eksternal SKPD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Indikator Kinerja adalah terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - Sasaran adalah Aparatur pemerintah dan masyarakat.
 - Sasaran adalah kantor BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Indikator Kinerja adalah meningkatnya disiplin aparatur
 - Sasaran adalah Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Pn Bangka Belitung
4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
 - Indikator Kinerja adalah Terdukungnya manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
 - Sasaran adalah Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - Indikator Kinerja Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.
 - Sasaran adalah Aparatur pemerintah dan masyarakat.
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Indikator Kinerja Meningkatnya system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
 - Sasaran adalah Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
 - Indikator Kinerja adalah Terbentuknya sistem pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana
 - Sasaran adalah Aparatur dan Masyarakat di 7 Kabupaten/Kota
8. Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat
 - Indikator Kinerja adalah Terlaksananya tanggap darurat dan logistik/peralatan saat terjadi bencana
 - Sasaran adalah Aparatur dan Masyarakat di 7 Kabupaten/Kota
9. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
 - Indikator Kinerja adalah Terlaksananya Pemulihan/Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
 - Sasaran adalah Daerah dan Masyarakat Terkena Bencana

5.4. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program/kegiatan merupakan pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan untuk menjalankan setiap kegiatan pertahun dengan melihat besaran dan kondisi ketersediaan anggaran daerah.

Rincian program, kegiatan indikator kinerja serta pendanaan indikatif BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017 adalah sebagaimana terlampir.

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BESERTA INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 – 2017

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
						TAR GET	2013	TAR GET	2014	TAR GET	2015	TAR GET	2016	TAR GET	2017
							Rp		Rp		Rp		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Gaji Dan Tunjangan Pegawai	-	-	PNS/CPNS di lingkungan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PN S/ CP NS	3,159,823,162.00	PNS/ CPN S	3,475,805,478.20	PNS/ CPNS	3,823,386,026.02	PNS/ CPN S	4,205,724,628.62	PNS/ CPN S	4,626,297,091.48
II	BELANJA LANGSUNG														
1. a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terbiayainya Pelaksanaan Jasa Surat Menyurat (bulan)	Institusi pemerintah dan masyarakat	12	8,500,000.00	12	15,000,000.00	12	15,750,000.00	12	16,537,500.00	12	17,364,375.00
b.			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Terbiayainya jasa komunikasi, sumber daya air listrik Perkantoran	kantor BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12	154,200,000.00	12	161,200,000.00	12	169,260,000.00	12	177,723,000.00	12	186,609,150.00
c.			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbiayainya honorarium pelaksana Administrasi keuangan (bulan)	Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12	50,880,000.00	12	95,160,000.00	12	99,918,000.00	12	104,913,900.00	12	110,159,595.00

d.			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbiayainya honorarium Petugas kebersihan dan Alat-alat Kebersihan kantor (bulan)	kantor BPBD dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12	193,500,000.00	12	238,500,000.00	12	262,350,000.00	12	288,585,000.00	12t	317,443,500.00
e.			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terbiayainya Penyediaan alat tulis kantor (bulan)	Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12	110,730,750.00	12	199,800,000.00	12	209,790,000.00	12	220,279,500.00	12	231,293,475.00
f.			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terbiayainya Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12	33,075,000.00	12	56,500,000.00	12	59,325,000.00	12	62,291,250.00	12	65,405,812.50
g.			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terbiayainya Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kantor BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12	20,000,000.00	12	30,000,000.00	12	31,500,000.00	12	33,075,000.00	12	34,728,750.00
h.			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terbiayainya Penyediaan Peralatan rumah tangga	kantor BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12	21,500,000.00	12	24,000,000.00	12	25,200,000.00	12	26,460,000.00	12	27,783,000.00
i.			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Terbiayainya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12	14,448,000.00	12	16,000,000.00	12	16,800,000.00	12	17,640,000.00	12	18,522,000.00
j.			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terbiayainya Bahan Logistik Kantor	Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12	7,080,000.00	12	12,600,000.00	12	13,230,000.00	12	13,891,500.00	12	14,586,075.00

k.			Penyediaan Makanan Dan Minuman	Terbiayainya Penyediaan Makanan dan minuman Untuk Tamu	Kegiatan, rapat, jamuan terhadap tamu	12	43,000,000.00	12	48,000,000.00	12	50,400,000.00	12	52,920,000.00	12	55,566,000.00
l.			Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terbiayainya Dana Perjalanan Dinas Pegawai Untuk mengikuti Rapat Koordinasi di luar Daerah	internal dan eksternal SKPD	12	450,000,000.00	12	780,440,000.00	12	858,484,000.00	12	944,332,400.00	12	1,038,765,640.00
m.			Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Terbiayainya honorarium Tenaga kontrak.	honorarium di lingkungan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12	105,300,000.00	12	128,700,000.00	12	141,570,000.00	12	155,727,000.00	12	171,299,700.00
n.			Monev Survey Dan Pengumpulan Data Bencana Terpadu Ke Kabupaten / Kota	Terbiayainya Dana Perjalanan Dinas Pegawai Untuk mengikuti monev Survey dan Pengumpulan Data Serta Sosialisasi Terpadu Ke Kab/Kota.	7 Dokumen Kabupaten/Kota	40 Kecamatan	100,000,000.00	40 Kecamatan	100,000,000.00	40 Kecamatan	110,000,000.00	40 Kecamatan	115,500,000.00	40 Kecamatan	121,275,000.00
	JUMLAH TOTAL						1,312,213,750.00		1,905,900,000.00		2,063,577,000.00		2,229,876,050.00		2,410,802,072.50
2. a.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penyusunan DED Pembangunan Gedung	Laporan DED Pembangunan Gedung,	Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Laporan	238,825,000.00	Laporan							
b.			Pengadaan DED Gudang Besar Khusus Peralatan Logistik	Laporan DED Gudang Besar Khusus Peralatan Logistik	Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Laporan	214,120,000.00	Laporan							
c.			Pengadaan DED Pusedalops	Laporan DED Pusedalops	Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Laporan		Laporan		200,000,000.00					

d.			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor BPBD lama	Tersedianya pagar gedung kantor	Pagar kantor			100 %	209,500,000.00						
e.			Pembangunan Gedung BPBD	Terbangunnya gedung BPBD	Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-			1 Paket	4,000,000,000.00	1 Paket	2,500,000,000.00		
f.			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terbiayainya Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Paket	72,995,000.00			1 Paket	80,294,500.00	1 Paket	88,323,950.00	1 Paket	97,156,345.00
g.			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terbiayainya Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan roda empat dan dua					3 Unit	850,000,000.00	5 Unit	935,000,000.00	6 Unit	1,028,500,000.00
h.			Pengadaan Meubelair	Terbiayainya Pengadaan meja rapat, meja 1 biro, meja 1/2 biro dan meubelair lainnya	Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					1 Paket	121,000,000.00	1 Paket	127,050,000.00	1 Paket	133,402,500.00
i.			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terbiayainya Pengadaan peralatan gedung kantor	Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Paket	166,170,000.00			1 Paket	174,478,500.00	1 Paket	183,202,425.00	1 Paket	192,362,546.25
j.			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terbiayainya Pemeliharaan Gedung kantor BPBD	kantor BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Tahun	83,790,000.00	1 Tahun	70,000,000.00	1 Paket	77,000,000.00	1 Paket	84,700,000.00	1 Paket	93,170,000.00

k.			Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tim PB BPBD	Terpeliharanya Kesehatan pelayanan kesehatan Tim PB BPBD	Aparatur/Relawan	100 ORANG	38,000,000.00	125 ORANG	41,870,000.00	150 ORANG	49,828,760.00	175 ORANG	54,358,648.00	200 Org	59,300,343.00
l.			Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Terpeliharanya Meubelair kantor	kantor BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					1 Paket	5,100,000.00	1 Paket	5,610,000.00	1 Paket	6,171,000.00
m.			Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	Terbiayanya Rehabilitasi Gedung kantor BPBD	kantor BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12	97,450,000.00			12	97,450,000.00	12	102,322,500.00	12	107,438,625.00
n.			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terbiayanya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Paket	25,000,000.00			1 Paket	27,500,000.00	1 Paket	30,250,000.00	1 Paket	33,275,000.00
o.			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terbiayanya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Tahun	25,000,000.00	1 Tahun	70,000,000.00	1 Tahun	73,500,000.00	1 Tahun	77,175,000.00	1 Tahun	81,033,750.00
p.			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terbiayanya Pemeliharaan Mobil dan motor Kendaraan dinas/operasional Kantor	Kendaraan roda empat dan dua	12	383,334,000.00	12	709,440,000.00	12	780,384,000.00	12	858,422,400.00	12	944,264,640.00
q.			Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir Dan Halaman Kantor	Terbiayanya Pemeliharaan Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	taman, tempat parkir dan halaman kantor BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					1 Paket	15,000,000.00	1 Paket	16,500,000.00	1 Paket	17,325,000.00

r			Pengadaan Land Clearing Kawasan Gedung Kantor BPBD	Laporan Land Clearing Kawasan Gedung Kantor BPBD	Kawasan BPBD	4 Laporan	95,240,000.00								
	JUMLAH TOTAL						1,439,924,000.00		1,100,810,000.00		6,551,535,760.00		5,062,914,923.00		2,793,399,749.25
3.a	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terbiayanya Pengadaan Seragam Pegawai beserta Perlengkapannya	Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%	13,790,000.00	100%	42,300,000.00	100%	142,000,000.00	100%	149,100,000.00	100%	156,555,000.00
b.			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Terbiayanya Pengadaan Seragam KORPRI dan OlahRaga	Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				100%		42,350,000.00	100%	46,585,000.00	100%	51,243,500.00
	JUMLAH TOTAL						13,790,000.00		42,300,000.00		184,350,000.00		195,685,000.00		207,798,500.00
4.a	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.	Terdukungnya Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rapat Koordinasi (RAKOR) Perencanaan dan Monev	Terlaksananya Rakor Perencanaan dan Monev BPBD	Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kab/Kota serta Lintas Sektor				1 Paket		165,000,000.00	1 Paket	173,250,000.00	1 Paket	181,912,500.00
b.			Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender	Tersusunnya Dokumen / Panduan PPRG	Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kab/Kota serta Lintas Sektor				1 Paket		60,000,000.00	1 Paket	63,000,000.00	1 Paket	66,150,000.00

	JUMLAH TOTAL										225,000,000.00		236,250,000.00		248,062,500.00
5.a	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya laporan yang tepat dan baik	Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kab/Kota serta Lintas Sektor					1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	55,000,000.00	1 Dokumen	60,500,000.00
b.			Pembelajaran penyusunan peraturan Gubernur tentang Mekanisme pencairan dana saat tanggap darurat	Meningkatnya peran serta BPBD di daerah	Tersedianya Peraturan Gubernur			Peraturan gubernur	14,000,000.00				236,250,000.00		248,062,500.00
c.			Pembelajaran Peningkatan Aparatur Pemerintahan	Terciptanya Aparatur yang berkompeten di bidangnya	Pegawai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kab/Kota serta Lintas Sektor				300,000,000.00	1 Paket	315,000,000.00	1 Paket	330,750,000.00	1 Paket	347,287,500.00
d.			Monitoring Terpadu Ke Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring Terpadu Kab/Kota	Kabupaten / Kota					1 Paket	450,000,000.00	1 Paket	495,000,000.00	1 Paket	544,500,000.00

e.			Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Pembagian Peran, Tanggungjawab dan Kewenangan Saat Darurat Bencana	Tersusunnya Pergub tentang Prosedur Pembagian Peran, Tanggungjawab dan Kewenangan Saat Darurat Bencana sebanyak 20 Pergub	Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat			-	-	1 PERGUB	200,000,000.00	-	-	1 PERGUB	200,000,000.00
f.			Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Prov. Keb. Babel	Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Prov. Keb. Babel Sebanyak 2 Pergub	Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat			-	-	-	-	-	-	1 PERGUB	200,000,000.00
	JUMLAH TOTAL						0.00		314,000,000.00		1,015,000,000.00		1,117,000,000.00		1,600,350,000.00
6. a.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ SKPD	Tersusunnya Laporan LAKIP, LPPD dan LKPJ BPBD	Aparatur Pemerintahan			Laporan	14,150,000.00	Laporan	15,565,000.00	Laporan	17,121,500.00	Laporan	18,833,650.00
	JUMLAH TOTAL						0.00		14,150,000.00		15,565,000.00		17,121,500.00		18,833,650.00

7. a.	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Terbentuknya sistem pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Koordinasi dan sosialisasi Kelembagaan dan Mitigasi Bencana di Prov.Kep.Bangka Belitung.	Terselenggarakannya koordinasi dan Sosialisasi kelembagaan dan mitigasi di 7 Kab/Kota di Prov.Kep.Babel	Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat	-	-	-		Kab/Kota (40 ORANG)	250,000,000.00	Kab/Kota (40 ORANG)	250,000,000.00	Kab/Kota (40 ORANG)	250,000,000.00
b.			Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait	Terselenggarakannya Koordinasi Kebencanaan	Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat	7 KAB/KOTA	96,033,800.00			7 KAB/KOTA	100,000,000.00	7 KAB/KOTA	100,000,000.00	7 KAB/KOTA	100,000,000.00
c.			Sosialisasi tentang penanggulangan bencana ke pelajar/mahasiswa	Terselenggaranya sosialisasi tentang penanggulangan bencana 1 x setahun	Pelajar dan Mahasiswa			400 ORANG	161,000,000.00	400 ORANG	161,000,000.00	400 ORANG	161,000,000.00	400 ORANG	161,000,000.00
d.			Menyediakan bantuan pengadaan buku pegangan dan bahan ajar untuk pendidikan siaga bencana.	Terlaksananya pengadaan buku pegangan dan bahan ajar untuk pendidikan siaga bencana	Aparatur dan siswa/siswi					1 PAKET	400,000,000.00	1 PAKET	400,000,000.00	1 PAKET	400,000,000.00

e.			Fasilitasi pembentukan Forum pengurangan Risiko Bencana dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penanggulangan bencana daerah	Terselenggaranya konsolidasi dan koordinasi berkala para pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	Aparatur dan Masyarakat			70 ORANG	220,000,000.00	70 ORANG	220,000,000.00	70 ORANG	220,000,000.00	70 ORANG	220,000,000.00
f.			Penyediaan dukungan partisipasi lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Kontrak kerja sama yang mendukung persediaan kebutuhan-kebutuhan penanganan darurat dan pemulihan bencana.	Aparatur dan Masyarakat					1 PAKET	200,000,000.00	1 PAKET	200,000,000.00		
g.			Perencanaan dan pembangunan jaringan informasi dan komunikasi kebencanaan terpusat dengan pemanfaatan fasilitas umum sebagai interface	Adanya 3 perusahaan tepon seluler untuk menyebarkan SMS yang berisi informasi mengenai bencana	Aparatur dan Masyarakat					1 PAKET	480,000,000.00	1 PAKET	500,000,000.00	1 PAKET	550,000,000.00
h.			Identifikasi daerah rawan bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Prov.Kep.Babel sebanyak 200 orang	Kelompok Masyarakat			7 Kab/Kota	156,200,000.00	7 Kab/Kota	200,000,000.00	7 Kab/Kota	200,000,000.00	7 Kab/Kota	200,000,000.00

i.			Sosialisasi tentang kesiapsiagaan Banjir	Tersusunnya rencana evakuasi partisipatif masyarakat di zona penagganan bencana banjir	Aparatur dan Masyarakat					40 ORANG	200,000,000.00	40 ORANG	200,000,000.00	40 ORANG	200,000,000.00
j.			Menyusun dokumen kajian risiko bencana daerah/data base potensi bencana	tersedianya dokumen kajian risiko bencana	Daerah rawan Bencana					DOKUMEN	300,000,000.00	DOKUMEN	300,000,000.00	DOKUMEN	300,000,000.00
k.			Melakukan latihan berkala kesiapsiagaan Bencana banjir	Terlaksananya latihan kesiapsiagaan bencana banjir	Aparatur/Masyarakat					50 ORANG	100,000,000.00	50 ORANG	100,000,000.00	50 ORANG	100,000,000.00
l.			Pelatihan kesiapsiagaan bencana cuaca ekstrem	Terselenggaranya pelatihan kesiapsiagaan bencana cuaca ekstrem minimal 1x setahun	Aparatur/Masyarakat					50 ORANG	260,000,000.00	50 ORANG	260,000,000.00	50 ORANG	260,000,000.00

m.			Pelatihan kesiapsiagaan bencana dikawasan perindustrian	terselenggaranya latihan kesiapsiagaan dikawasan perindustrian minimal 1 x setahun	Aparatur/Masyarakat					50 ORANG	260,000,000.00	50 ORANG	260,000,000.00	50 ORANG	260,000,000.00
n.			Pendidikan dan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana sebanyak 40 orang	Relawan Bencana	40 ORANG	194,595,000.00			40 ORANG	200,000,000.00	40 ORANG	200,000,000.00	40 ORANG	200,000,000.00
o.			Pembangunan Tanggul Penahan Abrasi	Terbangunnya Tanggul Penahan Abrasi Sebanyak di 3 Kab/Kota	Daerah Rawan Bencana					1 PAKET	2,500,000,000.00	1 PAKET	2,500,000,000.00	1 PAKET	2,500,000,000.00
p.			Pembangunan Break Water di Pesisir Pantai	Terbangunnya Break Water di Pesisir Pantai Sebanyak 5 paket	Daerah Rawan Bencana					1 PAKET	3,500,000,000.00	1 PAKET	3,500,000,000.00	1 PAKET	3,500,000,000.00
q.			Pembangunan Jalur Evakuasi	Terbangunnya Jalur Evakuasi Sebanyak 5 Paket	Daerah Rawan Bencana					1 PAKET	2,000,000,000.00	1 PAKET	2,000,000,000.00	1 PAKET	2,000,000,000.00
r.			Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Diri Saat Terjadi Bencana.	Terlaksananya Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Diri Saat Terjadi Bencana Sebanyak 5 Kegiatan di setiap 7 Kab/Kota	Masyarakat					1 KEGIATAN	300,000,000.00	1 KEGIATAN	300,000,000.00	1 KEGIATAN	300,000,000.00

s			Penyusunan Rencana Evakuasi di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana	Tersusunnya Rencana Evakuasi di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Sebanyak 2 Kegiatan 7 Kab/Kota	Masyarakat										1 KEGIATAN	250,000,000
t			Pembangunan Jaringan Informasi Kebencanaan Terpusat	Terbangunnya Jaringan Informasi Kebencanaan Terpusat Sebanyak 2 Paket Kegiatan di 7 Kab/Kota	Masyarakat										1 PAKET	3,500,000,000
u.			Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana	Tersedianya Sistem Peringatan Dini Bencana di Prov.Kep,Babel	Masyarakat					1 PAKET	500,000,000.00	1 PAKET	700,000,000.00	1 PAKET	800,000,000.00	

v.			Budidaya tanaman Mangrove dan Terumbu Karang di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Adanya Budidaya tanaman mangrove dan terumbu karang.	Garis pantai Kepulauan Bangka Belitung					1 PAKET	350,000,000.00	1 PAKET	390,000,000.00	1 PAKET	440,000,000.00
w.			Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana	Tersedianya Sistem Peringatan Dini Bencana di Prov.Kep,Babel	Masyarakat			-	-	-	-	-	-	1 PAKET	3,000,000,000.00
x.			Simulasi Evakuasi Masyarakat terhadap Bencana Banjir	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Bencana Banjir	Aparatur dan Masyarakat					1 KEGIATAN	700,000,000.00	1 KEGIATAN	700,000,000.00	1 KEGIATAN	700,000,000.00
y.			Simulasi Penanganan Darurat Bencana Kebakaran dan Kegagalan Teknologi berbasis Masyarakat	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Bencana Kebakaran dan Kegagalan Teknologi	Aparatur dan Masyarakat					1 KEGIATAN	700,000,000.00	1 KEGIATAN	700,000,000.00	1 KEGIATAN	700,000,000.00

z			Gladi Posko Berkala Prosedur Operasi standar Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Gladi Posko Berkala Prosedur Operasi standar Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Sebanyak 5 Kegiatan	Aparatur dan Masyarakat					1 KEGIA TAN	400,000,000.0 0	1 KEGI ATA N	400,000,00 0.00	1 KEGI ATA N	400,00 0,000.0 0
aa			Penyusunan Rencana Kontijensi	Terlaksananya Pendampingan dalam penyusunan rencana kontijensi di 7 Kab/Kota	Aparatur dan Masyarakat					1 KEGIA TAN	300,000,000.0 0	2 KEGI ATA N	300,000,00 0.00	2 KEGI ATA N	300,00 0,000.0 0
	JUMLAH TOTAL PK						290,628,800.0 0	537,200,000.0 0			14,581,000,00 0.00		14,841,000, 000.00		21,591, 000,00 0.00
8. a.	Program Penyediaan Logistik/Pe ralatan dan Tanggap Darurat Penanggul angan Bencana	Terlaksananya tanggap darurat dan logistik / peralatan saat terjadi bencana.	Pembelajaran Penanggulangan Bencana ke Daerah Rawan Bencana	Terlaksananya Pembelajaran Penanggulangan Bencana ke Daerah Rawan Bencana	Aparatur/Relawan					1 KEGIA TAN	166,760,000.0 0	1 KEGI ATA N		1 KEGI ATA N	
b.			Seleksi Tim Satuan Reaksi Cepat	Terbiayainya Seleksi SDM SRC BPBD Prov.Kep. Babel	Aparatur/Relawan	25 O RA N G	67,650,000.00			25 ORAN G	70,000,000.00	25 ORA NG	75,000,000. 00	25 ORA NG	80,000, 000.00

c.			Operasional Kegiatan Kejadian Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Operasional Kegiatan Penanggulangan Bencana Prov. Kep. Babel	Aparatur/Relawan	13 BULAN	749,400,000.00	13 BULAN	1,077,290,000.00	13 BULAN	1,613,540,000.00	13 BULAN	1,602,976,409.00	13 BULAN	1,748,701,537.00
d.			Pelatihan Penguatan SRC BPBD	Terbiayainya Kegiatan Pelatihan Penguatan SRC BPBD	Aparatur/Relawan	37 ORANG	167,880,000.00			65 ORANG	513,900,000.00	95 ORANG	685,200,000.00	135 ORANG	856,500,000.00
e.			Pengadaan Makanan Tambahan Bagi Tim PB BPBD	Teelaksannya Pengadaan Makanan Tambahan Bagi Tim PB BPBD	Aparatur/Relawan	60 ORANG	388,080,000.00			120 ORANG	760,000,000.00	150 ORANG	940,000,000.00	180 ORANG	1,120,000,000.00
f.			Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat	Tersedianya Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat Sebanyak 375 Orang	Aparatur/Relawan			1 KEGIATAN	207,215,000.00	1 KEGIATAN	217,575,750.00	1 KEGIATAN	228,454,537.50	1 KEGIATAN	239,877,264.38
g.			Pengadaan Bahan Baku Bangunan Tanggap Darurat Bencana	Peningkatan Penguatan perlengkapan Tim PB BPBD	Masyarakat dan daerah rawan bencana					75 ORANG	277,681,983.00	75 ORANG	291,566,082.15	75 ORANG	306,144,386.26

h.			Penyiapan/Pengadaan Logistik di Kawasan Rawan Bencana	Terbiayainya Pengadaan Peralatan Penunjang Bencana Alam.	Masyarakat dan daerah rawan bencana	100%	344,608,600.00	100%	110,030,000.00	100%	115,531,500.00	100%	115,806,575.00	100%	121,596,903.75
i.			Penyiapan/Pengadaan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	Tersedianya Peralatan di Kawasan Rawan Bencana Sebanyak 5 Paket	Masyarakat dan daerah rawan bencana	KEGIATAN	447,250,000.00			KEGIATAN	500,000,000.00	KEGIATAN	500,000,000.00	KEGIATAN	500,000,000.00
j.			Pemeliharaan/Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Tersedianya Tempat Penyimpanan Logistik Dan Peralatan Serta Terawatnya Logistik Dan Peralatan Untuk PB.	Logistik		276,015,000.00			100%	300,000,000.00	100%	315,000,000.00	100%	330,750,000.00

k.			Pengambilan serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Terambilnya dan terdistribusinya Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana dari Pusat ke Daerah serta ke daerah bencana	BPBD dan Masyarakat yang terkena bencana		100 %	121,560,000.00	100%	250,000,000.00	100 %	300,000,000.00	100 %	350,000,000.00
l.			Pengerahan dan Mobilisasi TRC dalam Tanggap Darurat Bencana dan pencarian, pertolongan, evakuasi dilokasi bencana	Terbiayainya kegiatan operasional TRC	Tim Penanggulangan Bencana daerah		1 Tahun	163,300,000.00	1 Tahun	163,300,000.00	1 Tahun	163,300,000.00	1 Tahun	163,300,000.00
			JUMLAH TOTAL KL					2,440,883,600.00		1,679,395,000.00		4,948,289,233.00		5,816,870,091.38
9.a	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terlaksannya pemulihan / rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.	Pengembangan Jembatan Portable (Bailey)	Tersedianya Jembatan Portable (Bailey) sebagai Prasarana penting bagi masyarakat terdampak bencana	Daerah yang terputus Transportasinya	Jembatan Portable (Bailey) P: 15 m untuk bangunan		1,188,895,000.00	Jembatan Portable (Bailey) P: 15 m untuk bangunan dan Belituning	Jembatan Portable (Bailey) P: 45 m untuk bangunan dan Belituning		6,000,000,000.00	Jembatan Portable (Bailey) P: 60 m untuk bangunan dan Belituning	7,000,000,000.00

b.			Pengembangan Huntara menjadi Huntap dari panel beton	Terlaksananya pembuatan prototipe atau contoh Huntara menjadi Huntap sebagai sarana tempat tinggal yang aman bagi masyarakat terdampak bencana	Masyarakat yang akan menerima bantuan Huntara di Bangka Belitung atau seluruh Indonesia	4 Unit Huntara		12 Unit Huntara, 2 Unit di test ketahanan Gempa		10 Unit Huntara dari Beton panel	450,000,000.00	10 Unit Huntara dari beton panel	500,000,000.00	10 Unit Huntara dari beton panel	550,000,000.00
c.			Pelatihan Erection / install Jembatan Bailey	Terlaksananya Pelatihan	Aparatur, SRC dan atau Masyarakat	Instal Jembatan Bailey P: 15 m dibangka		Instal 2 (dua) Jembatan bailey P: 30 m dibangka belitung		Instal 2 (dua) Jembatan bailey P: 45 dibangka dan belitung	250,000,000.00	Instal 2 (dua) Jembatan bailey P: 60 m dibangka	250,000,000.00	Instal 2 (dua) Jembatan bailey P: 45 m dibangka dan belitung	350,000,000.00
d.			Pelatihan Erection / install Huntara menjadi Huntap dari beton panel	Terlaksananya Pelatihan	Aparatur, SRC dan atau Masyarakat	Kabupaten atau Kota yang punya APBD		Huntara dapat di instal dengan cepat		Huntara dapat di instal dengan cepat	170,000,000.00	Huntara dapat di instal dengan cepat	185,000,000.00	Huntara dapat di instal dengan cepat	200,000,000.00

e.			Pelatihan Perhitungan DaLA Pascabencana	Terlaksananya Pelatihan DaLA	Aparatur	Kabupaten dan atau Kota yang punya BPBD		Kabupaten dan atau kota yang punya BPBD		Kabupaten dan atau kota yang punya BPBD	300,000,000.00	Kabupaten dan atau Kota yang punya BPBD	325,000,000.00	Kabupaten dan atau Kota yang punya BPBD	350,000,000.00
f.			Pengujian Huntara tahan Gempa	Terlaksananya pengujian Huntara tahan gempa sebanyak 1 unit	2 Unit Huntara yang ditest	Mendapatkan referensi/rekomendasi		2 Unit Huntara yang ditest							
g.			Uji Terap pengembangan rehabilitasi penanaman mangrove / bakau di kawasan pesisir akibat abrasi di Kab. Bangka Tengah	Terlaksananya uji terap pengembangan penanaman mangrove / bakau rehabilitasi kawasan pesisir	Masyarakat dan daerah yang terkena dampak abrasi			1 Paket							

h.			Uji Terap pengembangan rehabilitasi penanaman mangrove / bakau di kawasan pesisir akibat abrasi di Kab. Bangka	Terlaksananya uji terap pengembangan penanaman mangrove / bakau rehabilitasi kawasan pesisir	Masyarakat dan daerah yang terkena dampak abrasi					1 Paket	250,000,000.00				
i.			Uji Terap pengembangan rehabilitasi penanaman mangrove / bakau di kawasan pesisir akibat abrasi di Kab. Belitung	Terlaksananya uji terap pengembangan penanaman mangrove / bakau rehabilitasi kawasan pesisir	Masyarakat dan daerah yang terkena dampak abrasi							1 Paket	300,000,000.00		
j.			Uji Terap pengembangan rehabilitasi penanaman mangrove / bakau di kawasan pesisir akibat abrasi di Kab. Bangka Selatan	Terlaksananya uji terap pengembangan penanaman mangrove / bakau rehabilitasi kawasan pesisir	Masyarakat dan daerah yang terkena dampak abrasi								1 Paket	350,000,000.00	
k.			Pelatihan Pendampingan / Konseling dampak psikis pasca bencana	Terlaksananya Pelatihan	Aparatur	7 Kab/Kota		7 Kab/Kota	Rp 320,000,000	7 Kab/Kota	420,000,000.00	7 Kab/Kota	420,000,000.00	7 Kab/Kota	490,000,000.00

l.			Pemulihan kesehatan psikis masyarakat pasca bencana di 7 Kab/Kota	Terselenggaranya pemulihan kesehatan psikis masyarakat pasca bencana	Masyarakat korban pasca bencana	7 Kab/Kota				7 Kab/Kota	420,000,000.00	7 Kab/Kota	420,000,000.00	7 Kab/Kota	3,500,000.00
m.			Koordinasi dan sosialisasi kegiatan rehabilitasi dan sosialisasi di 7 Kab/Kota	Terselenggaranya koordinasi dan sosialisasi di 7 Kab/Kota	Aparatur	7 Kab/Kota				7 Kab/Kota	280,000,000.00	7 Kab/Kota	28,000,000.00	7 Kab/Kota	350,000,000.00
n.			Pembelajaran dan studi lapangan penerapan teknologi rehabilitasi dan rekonstruksi ke instansi teknis	Tercapainya pengetahuan penerapan teknologi rehabilitasi dan rekonstruksi dilapangan	Aparatur	1 Paket				1 Paket	150,000,000.00	1 Paket	150,000,000.00	1 Paket	150,000,000.00
o.			Pemberian bantuan dana tunjangan hidup sementara, kesehatan dan perbaikan rumah masyarakat pasca bencana di 7 Kab/Kota	Terselenggaranya pemberian bantuan dana kepada masyarakat	Masyarakat	7 Kab/Kota				7 Kab/Kota	1,750,000,000.00	7 Kab/Kota	1,750,000,000.00	7 Kab/Kota	2,100,000,000.00
	JUMLAH TOTAL RR						1,188,895,000.00		Rp 320,000,000		10,440,000,000.00		11,328,000,000.00		4,893,500,000.00

<p>Mengembangkan budaya sadar bencana dalam masyarakat;</p>	<p>1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;</p>	<p>1 . Terbentuknya sistem pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana</p>	<p>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</p> <p>1. Koordinasi dan sosialisasi Kelembagaan dan Mitigasi Bencana di Prov.Kep.Bangka Belitung.</p>
<p>Mengembangkan budaya sadar bencana dalam masyarakat;</p>	<p>2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif dan efisien dengan didukung oleh logistik yang memadai;</p>	<p>2 . Terlaksananya tanggap darurat dan logistik/peralatan saat terjadi bencana</p>	<p>Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana</p> <p>1. Pembelajaran Penanggulangan Bencana ke Daerah Rawan Bencana</p> <p>2. Seleksi Tim Satuan Reaksi Cepat</p> <p>3. Operasional Kegiatan Kejadian Penanggulangan Bencana</p> <p>4. Pengadaan Makanan Tambahan Bagi Tim PB BPBD</p> <p>5. Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat</p> <p>6. Pengadaan Bahan Baku Bangunan Tanggap Darurat Bencana</p> <p>7. Penyiapan/Pengadaan Logistik di Kawasan Rawan Bencana</p> <p>8. Penyiapan/Pengadaan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana</p> <p>9. Pemeliharaan/Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana</p> <p>10. Pengambilan serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana</p> <p>11. Pengerahan dan Mobilisasi TRC dalam Tanggap Darurat Bencana dan pencarian, pertolongan, evakuasi dilokasi bencana</p>
<p>Mengembangkan budaya sadar bencana dalam masyarakat;</p>	<p>3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.</p>	<p>3 . Terlaksananya Pemulihan/Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana</p>	<p>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</p> <p>1. Pemulihan kesehatan psikis masyarakat pasca bencana di 7 Kab/Kota</p> <p>2. Koordinasi dan sosialisasi kegiatan rehabilitasi dan sosialisasi di 7 Kab/Kota</p> <p>3. Pemberian bantuan dana tunjangan hidup sementara, kesehatan dan perbaikan rumah masyarakat pasca bencana di 7 Kab/Kota</p>

MISI 3 : Memelihara dan meningkatkan pelayanan bencana yang bermutu, merata dan terjangkau secara professional;

Mengembangkan Sumber Daya Aparatur dan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana;

1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;	1.	Terbentuknya sistem pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	
			1.	Pelatihan kesiapsiagaan bencana cuaca ekstrim
			2.	Pelatihan kesiapsiagaan bencana dikawasan perindustrian
			3.	Pendidikan dan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana
			4.	Pembangunan Tanggul Penahan Abrasi
			5.	Pembangunan Break Water di Pesisir Pantai
			6.	Pembangunan Jalur Evakuasi
			7.	Budidaya tanaman Mangrove dan Terumbu Karang di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi
			8.	Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana
			2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif dan efisien dengan didukung oleh logistik yang memadai;	2.
1.	Pelatihan Penguatan SRC BPBD			
3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.	3.	Terlaksananya Pemulihan/Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	
			1	Pelatihan Erection / install Jembatan Bailey
			2	Pelatihan Erection / install Huntara menjadi Huntap dari beton panel
			3	Pelatihan Perhitungan DaLA Pascabencana
			4	Pengujian Huntara tahan Gempa
			5	Uji Terap pengembangan rehabilitasi penanaman mangrove / bakau di kawasan pesisir akibat abrasi di Kab. Bangka Tengah
			6	Pembelajaran dan studi lapangan penerapan teknologi rehabiltasi dan rehonstruksi ke instansi teknis

				6	Uji Terap pengembangan rehabilitasi penanaman mangrove / bakau di kawasan pesisir akibat abrasi di Kab. Bangka
				7	Uji Terap pengembangan rehabilitasi penanaman mangrove / bakau di kawasan pesisir akibat abrasi di Kab. Belitung
				8	Uji Terap pengembangan rehabilitasi penanaman mangrove / bakau di kawasan pesisir akibat abrasi di Kab. Bangka Selatan
				9	Pelatihan Pendampingan / Konseling dampak psikis pasca bencana
				10	Pengembangan Jembatan Portable (Bailey)
				11	Pengembangan Huntara menjadi Huntap dari panel beton

MISI 4 : Meningkatkan keterpaduan penyelenggaran penanganan bencana;

Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang memadai;	1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;	1	Terbentuknya sistem pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	
				1	Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait
				2	Fasilitasi pembentukan Forum pengurangan Risiko Bencana dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penanggulangan bencana daerah
				3	Penyediaan dukungan partisipasi lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
				4	Identifikasi daerah rawan bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana
				5	Menyusun dokumen kajian risiko bencana daerah/data base potensi bencana
				6	Penyusunan Rencana Evakuasi di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana
				7	Penyusunan Rencana Kontijensi
				8	Gladi Posko Berkala Prosedur Operasi standar Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana
				9	Penyusunan Rencana Kontijensi

MISI 5 : Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam penanganan bencana;

Mendukung kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana	Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;	1	Terbentuknya sistem pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	
				1.	Melakukan latihan berkala kesiapsiagaan Bencana banjir

MISI 6 : Menyediakan informasi secara cepat, tepat dan akurat untuk penanganan bencana dan masalah-masalah lain.				
Mendorong semangat gotong royong dan kedermawanan.	Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;	1. Terpentunya sistem pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	
			1.	Menyediakan bantuan pengadaan buku pegangan dan bahan ajar untuk pendidikan siaga bencana.
			2.	Perencanaan dan pembangunan jaringan informasi dan komunikasi kebencanaan terpusat dengan pemanfaatan fasilitas umum sebagai interface
			3.	Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Diri Saat Terjadi Bencana.

**RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DARI TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN TAHUN 2017**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET SASARAN (2013-2017)		TARGET CAPAIAN PER TAHUN				
			TARGET	SASARAN	2013	2014	2015	2016	2017
-1	-2	-3	4	5	6	7	8	9	10
a.	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Koordinasi dan sosialisasi Kelembagaan dan Mitigasi Bencana di Prov. Kep. Bangka Belitung.	120 ORG	Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat	-	-	Kab/Kota (40 ORANG)	Kab/Kota (40 ORANG)	Kab/Kota (40 ORANG)
b.		Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait	7 KAB/KOTA	Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat	7 KAB/KOTA		7 KAB/KOTA	7 KAB/KOTA	7 KAB/KOTA

c.	Sosialisasi tentang penanggulangan bencana ke pelajar/mahasiswa	1600 ORANG	Pelajar dan Mahasiswa		400 ORANG	400 ORANG	400 ORANG	400 ORANG
d.	Menyediakan bantuan pengadaan buku pegangan dan bahan ajar untuk pendidikan siaga bencana.	1 PAKET	Aparatur dan siswa/siswi			1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET
e.	Fasilitasi pembentukan Forum pengurangan Risiko Bencana dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penanggulangan bencana daerah	280 ORANG	Aparatur dan Masyarakat		70 ORANG	70 ORANG	70 ORANG	70 ORANG
f.	Penyediaan dukungan partisipasi lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	1 PAKET	Aparatur dan Masyarakat			1 PAKET	1 PAKET	
g.	Perencanaan dan pembangunan jaringan informasi dan komunikasi kebencanaan terpusat dengan pemanfaatan fasilitas umum sebagai interface	1 PAKET	Aparatur dan Masyarakat			1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET
h.	Identifikasi daerah rawan bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana	7 Kab/Kota	Kelompok Masyarakat		7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota
i.	Sosialisasi tentang kesiapsiagaan Banjir	120 ORANG	Aparatur dan Masyarakat			40 ORANG	40 ORANG	40 ORANG
j.	Menyusun dokumen kajian risiko bencana daerah/data base potensi bencana	DOKUMEN	Daerah rawan Bencana			DOKUMEN	DOKUMEN	DOKUMEN
k.	Melakukan latihan berkala kesiapsiagaan Bencana banjir	150 ORANG	Aparatur/Masyarakat			50 ORANG	50 ORANG	50 ORANG
l.	Pelatihan kesiapsiagaan bencana cuaca ekstrim	150 ORANG	Aparatur/Masyarakat			50 ORANG	50 ORANG	50 ORANG
m.	Pelatihan kesiapsiagaan bencana dikawasan perindustrian	150 ORANG	Aparatur/Masyarakat			50 ORANG	50 ORANG	50 ORANG
n.	Pendidikan dan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	160 ORANG	Relawan Bencana	40 ORANG		40 ORANG	40 ORANG	40 ORANG

o.		Pembangunan Tanggul Penahan Abrasi	1 PAKET	Daerah Rawan Bencana	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET
p.		Pembangunan Break Water di Pesisir Pantai	1 PAKET	Daerah Rawan Bencana	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET
q.		Pembangunan Jalur Evakuasi	1 PAKET	Daerah Rawan Bencana	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET
r.		Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Diri Saat Terjadi Bencana.	1 KEGIATAN	Masyarakat	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN
s.		Penyusunan Rencana Evakuasi di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana	1 KEGIATAN	Masyarakat	-	-	-	-	1 KEGIATAN
t.		Pembangunan Jaringan Informasi Kebencanaan Terpusat	1 PAKET	Masyarakat	-	-	-	-	1 PAKET
u.		Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana	1 PAKET	Masyarakat	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET
v.		Budidaya tanaman Mangrove dan Terumbu Karang di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi	1 PAKET	Garis pantai Kepulauan Bangka Belitung	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET	1 PAKET
w.		Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana	1 PAKET	Masyarakat	-	-	-	-	1 PAKET
x.		Simulasi Evakuasi Masyarakat terhadap Bencana Banjir	1 KEGIATAN	Aparatur dan Masyarakat	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN
y.		Simulasi Penanganan Darurat Bencana Kebakaran dan Kegagalan Teknologi berbasis Masyarakat	1 KEGIATAN	Aparatur dan Masyarakat	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN
z.		Gladi Posko Berkala Prosedur Operasi standar Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana	1 KEGIATAN	Aparatur dan Masyarakat	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN
aa.		Penyusunan Rencana Kontijensi	1 KEGIATAN	Aparatur dan Masyarakat	1 KEGIATAN	2 KEGIATAN	1 KEGIATAN	2 KEGIATAN	2 KEGIATAN
a.	Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggapan Darurat	Pembelajaran Penanggulangan Bencana ke Daerah Rawan Bencana	1 KEGIATAN	Aparatur/Relawan			1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN
b.		Seleksi Tim Satuan Reaksi Cepat	112 ORANG	Aparatur/Relawan	37 ORANG		25 ORANG	25 ORANG	25 ORANG

c.	Penanggulangan Bencana	Operasional Kegiatan Kejadian Penanggulangan Bencana	13 BULAN	Aparatur/Relawan	13 BULAN	13 BULAN	13 BULAN	13 BULAN	13 BULAN
d.		Pelatihan Penguatan SRC BPBD	112 ORANG	Aparatur/Relawan	37 ORANG		62ORANG	87 ORANG	112 ORANG
e.		Pengadaan Makanan Tambahan Bagi Tim PB BPBD	510 ORANG	Aparatur/Relawan	60 ORANG		120 ORANG	150 ORANG	180 ORANG
f.		Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat	1 KEGIATAN	Aparatur/Relawan		1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN
g.	Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Pengadaan Bahan Baku Bangunan Tanggap Darurat Bencana	225 ORANG	Masyarakat dan daerah rawan bencana			75 ORANG	75 ORANG	75 ORANG
h.		Penyiapan/Pengadaan Logistik di Kawasan Rawan Bencana	100%	Masyarakat dan daerah rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
i.		Penyiapan/Pengadaan Peralatan di Kawasan Rawan Bencana	KEGIATAN	Masyarakat dan daerah rawan bencana	KEGIATAN		KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN
j.		Pemeliharaan/Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	100%	Logistik	100%		100%	100%	100%
k.		Pengambilan serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	100%	BPBD dan Masyarakat yang terkena bencana		100%	100%	100%	100%
l.		Pengerahan dan Mobilisasi TRC dalam Tanggap Darurat Bencana dan pencarian, pertolongan, evakuasi dilokasi bencana	1 Tahun	Tim Penanggulangan Bencana daerah		1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

a.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Pengembangan Jembatan Portable (Bailey)	Jembatan Portable (Bailey) P:120 m untuk bangka dan Belitung	Daerah yang terputus Transportasinya	Jembatan Portable (Bailey) P:15 m untuk bangka	Jembatan Portable (Bailey) P:45 m untuk bangka dan Belitung	Jembatan Portable (Bailey) P:60 m untuk bangka dan Belitung		
b.		Pengembangan Huntara menjadi Huntap dari panel beton	30 Unit Huntara dari Beton panel	Masyarakat yang akan menerima bantuan Huntara di Bangka Belitung atau seluruh Indonesia		10 Unit Huntara dari Beton panel	10 Unit Huntara dari beton panel	10 Unit Huntara dari beton panel	
c.		Pelatihan Erection / install Jembatan Bailey	Install 2 (dua) Jembatan bailey P: 120 m dibangka	Aparatur, SRC dan atau Masyarakat		Install Jembatan Bailey P: 15 m dibangka	Install 2 (dua) Jembatan bailey P: 60 m dibangka	Install 2 (dua) Jembatan bailey P : 45 m dibangka dan belitung	
d.		Pelatihan Erection / install Huntara menjadi Huntap dari beton panel	Kabupaten dan atau Kota yang punya BPBD	Aparatur, SRC dan atau Masyarakat		Kabupaten dan atau Kota yang punya BPBD	Kabupaten dan atau Kota yang punya BPBD	Kabupaten dan atau Kota yang punya BPBD	
e.		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Pelatihan Perhitungan DaLA Pascabencana	Kabupaten dan atau kota yang punya BPBD	Kabupaten dan atau Kota yang punya BPBD		Kabupaten dan atau kota yang punya BPBD	Kabupaten dan atau Kota yang punya BPBD	Kabupaten dan atau Kota yang punya BPBD
f.			Pengujian Huntara tahan Gempa	6 Unit Huntara yang di test	Mendapatkan refrensi / rekomendasi		2 Unit Huntara yang di test	2 Unit Huntara yang di test	2 Unit Huntara yang di test

g.	Uji Terap pengembangan rehabilitasi penanaman mangrove / bakau di kawasan pesisir akibat abrasi di Kab. Bangka Tengah	1 Paket			1 Paket			
h.	Uji Terap pengembangan rehabilitasi penanaman mangrove / bakau di kawasan pesisir akibat abrasi di Kab. Bangka	1 Paket				1 Paket		
i.	Uji Terap pengembangan rehabilitasi penanaman mangrove / bakau di kawasan pesisir akibat abrasi di Kab. Belitung	1 Paket					1 Paket	
j.	Uji Terap pengembangan rehabilitasi penanaman mangrove / bakau di kawasan pesisir akibat abrasi di Kab. Bangka Selatan	1 Paket						1 Paket
k.	Pelatihan Pendampingan / Konseling dampak psikis pasca bencana	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota		7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota
l.	Pemulihan kesehatan psikis masyarakat pasca bencana di 7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota		7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota
m.	Koordinasi dan sosialisasi kegiatan rehabilitasi dan sosialisasi di 7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota		7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota
n.	Pembelajaran dan studi lapangan penerapan teknologi rehabilitasi dan rekonstruksi ke instansi teknis	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket
o.	Pemberian bantuan dana tunjangan hidup sementara, kesehatan dan perbaikan rumah masyarakat pasca bencana di 7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota			7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota

B A B VI

INDIKATOR KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Proses penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan informasi dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan rencana kegiatan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Berdasarkan tugas dan fungsi utama BPBD sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana daerah, maka dalam pelaksanaan RPJM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, BPBD melakukan evaluasi dan pemantauan serta ikut dalam pelaksanaan penanggulangan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai. Secara umum indikator kinerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi tanggung jawab BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai koordinator penanggulangan bencana.

Memperhatikan tugas dan fungsi serta kegiatan yang dilaksanakan, maka indikaor kinerja pada BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada RPJM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 adalah yang pertama, Terwujudnya sistem pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dengan target capaian sampai 5 (lima) tahun denga tujuan menghimbau 7 Kabupaten/Kota untuk membentuk BPBD Kabupaten/Kota, sosialisasi, gladi dan simulasi peringatan dini dan evakuasi masyarakat; kedua, Terwujudnya Tim Penanganan Darurat yang Cepat, Tepat dan Akurat dengan di dukung Logistik yang Memadai dengan target capaian sampai 5 (lima) tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat terjadi bencana; dan ketiga, Terwujudnya Pemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi aspek kehidupan dengan target capaian sampai 5 (lima) tahun dengan sasaran 5 Kabupaten/Kota dengan pemulihan 50 % di skala provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2012 – 2017**

NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG

**URUSAN PEMERINTAHAN
YANG DILAKSANAKAN** : PENANGGULANGAN BENCANA

TUGAS POKOK : Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 26 Tahun 2009 Bab II pasal 5 BPBD
Provinsi mempunyai tugas;

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

: Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, BPBD

Provinsi mempunyai fungsi;

- h. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- i. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana;
- j. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan;
- k. Pengkoordinasian, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- l. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
- m. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan lingkup BPBD;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
<p>1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana; Dengan sasaran Aparatur dan masyarakat di 7 Kabupaten/Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah Rawan Bencana Yang di interpersi dalam • Persentase Daerah Rawan Bencana Yang di interpersi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan 	<p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah BPBD Kab/Kota yang Terbentuk}}{\text{Jumlah Keseluruhan BPBD}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Daerah Rawan Bencana Yang di interpersi}}{\text{Jumlah Seluruh Daerah Rawan Bencana}} \times 100\%$ Tipe Penghitungan : Komulatif Sumber Data : BPBD Prov. Kep. Bangka Belitung</p>
<p>2. Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif dan efisien dengan didukung oleh logistik yang memadai; Dengan sasaran Aparatur dan masyarakat di 7 Kabupaten /Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Logistik dengan jumlah korban bencana • Rasio peralatan dengan daerah rawan bencana • Rasio Relawan dengan jumlah penduduk didaerah rawan bencana 	<p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Logistik}}{\text{Jumlah Korban Bencana}} \times \frac{1}{3} \text{ Jumlah Pddk Prov Kep. Babel}$ $\frac{\text{Jumlah Peralatan}}{\text{Jumlah Daerah Rawan Bencana}} \times 7 \text{ Kab/Kota}$ $\frac{\text{Jumlah Relawan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 7 \text{ Kab/Kota}$ Tipe Penghitungan : Komulatif Sumber Data : BPBD Prov. Kep. Bangka Belitung</p>
<p>3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Kab/kota yang terlibat dalam Rehab rekon • Rasio rehab rekon dengan jumlah korban bencana 	<p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Kab / Kota yang Terlibat Dalam Rehab Rekons}}{\text{JUmlah Keseluruhan Kab / Kota}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Rehab Rekon}}{\text{Jumlah Korban Bencana}} \times 7 \text{ Kab/Kota}$ Sumber Data : BPBD Prov. Kep. Bangka Belitung</p>

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kep.Bangka Belitung Tahun 2012-2017 merupakan acuan pedoman bagi segenap komponen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas penyusunan rencana kegiatan tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis yang merupakan rancangan pembangunan jangka panjang menengah yang merupakan arahan dalam menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahunnya.

Hasil dari penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 diharapkan juga dapat menjadi tolak ukur dalam menyusun rencana kerja tahunan bagi BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Pangkalpinang,

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SYAHRIZAL.T
NIP. P10008702